DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Lalu Husni, 2004, ”*Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan”,Tahun 2004 Jakarta*: PT. Raja Grafindo Persada.

H Zainal Asikin, ”*Pengertian, Sifat dan Hakikat Hukum Perburuhan dalam Dasar-dasar Hukum Perburuhan”,* 1993.

Saprudin, “*Sosialisering Process* Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan, Bagian Hukum Perdata,” Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangangan (1), Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Husnan, Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, Jakarta, 1990.

Sidauruk, Markus. “*Kebijakan pengupahan di Indonesia; Tinjauan Kritis dan Panduan Menuju Upah Layak”*,. Bumi Intitama Sejahtera Jakarta, 2011.

Abdul Kadir Muhammad, “Hukum Perusahaan Indonesia”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Dra. Farida Hasyim, “Hukum Dagang”, Sinar Grafik. Jakarta, 2013.

Purwosutjipto, “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang”, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”,* UI Press, Jakarta, 1986

Ronny Hanitijo Soemitro, *"Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri",* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Nanang Martono, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Internet

www.gajimu.com/main/pengertian-upah-minimum

http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-perusahaan.html

http://makalahsdk.blogspot.co.id/2014/11/pengusaha-dan-pembantu-pengusaha.html

http://www.academia.edu/5740713/BAB-BAB_TENTANG_HUKUM_PERBURUHAN_INDONESIA

http://portalhr.com/konsultasi/beda-karyawan-tetap-dengan-karyawan-kontrak/

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.560/66 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Pada 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.